



Judul : Revisi UU Statistik, komisi X inisiatif perkuat peran BPS
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Statistik **Komisi X Inisiatif Perkuat Peran BPS**

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan komitmen parlemen untuk memperkuat tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS). Penguatan tersebut dilakukan melalui pembahasan revisi Undang-Undang Statistik yang akan memperbarui payung hukum statistik nasional.

Lalu menilai, revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sangat mendesak, mengingat regulasi lama tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan data nasional saat ini. Karena itu, diperlukan adaptasi regulasi yang lebih modern, kuat, dan responsif.

Ia menjelaskan, Komisi X DPR telah menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR tertanggal 20 Januari 2026 untuk mengawal pembahasan revisi undang-undang tersebut. Penugasan itu menjadi dasar bagi parlemen untuk berinisiatif memperkuat tugas, fungsi, dan peran BPS di tingkat nasional.

"Ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menempatkan statistik sebagai fondasi utama kebijakan negara," ujar Lalu dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Lalu, keberadaan BPS memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Peran tersebut semakin dipertegas melalui

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengelolaan Data Tunggal.

"Negara telah mengakui peran strategis BPS melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Karena itu, kami menegaskan tidak boleh ada pelemahan terhadap peran dan fungsi BPS," tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan data nasional semakin solid dan terpercaya. Komisi X akan memastikan tidak ada celah yang dapat mendegradasi otoritas BPS sebagai penyedia data utama di Indonesia.

Menurutnya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke depan akan menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Karena itu, Lalu mengingatkan pentingnya tata kelola statistik nasional yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar internasional. Tujuannya agar data yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Indonesia beruntung memiliki BPS yang tangguh dan solid. Kerja-kerjanya sudah terbukti dan diakui," ujar politikus PKB asal Nusa Tenggara Barat tersebut. ■ PYB